

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.P.Parlindungan, *Landreform di Indonesia*, Suatu Studi Perbandingan. Alumni, Bandung, 1989.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012 .

_____, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P.24 Tahun 1997) dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P. 37 Tahun 1998)*, CV. Mandar maju, Bandung, 1999.

Aamirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

_____, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Aprianto, *Tafsir(an) landreform dalam alur sejarah indonesia tinjauan kritis atas tafsir(an) yang ada*, Karsa, Yogyakarta, 2006.

Arba, H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.

Baturbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung, 2012

_____, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Chita, Herdiyanti, “Kepemilikan Tanah Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977”, *Jurnal Media Publication*, Vol. 1 No. 1, 2017

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Fauzi, Noer, *Konsep dan Praktek Politik Hukum Agraria yang Menyangkal Kenyataan Hak Masyarakat*, Insist Press, Yogyakarta, 2000

- G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972.
- Hadi, Haerul dan Safiulloh, *Pembatalan oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli yang dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)*, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2022.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hadjonm, Philipus M., *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- Handayani, Sri Wahyu, *Hukum Agraria di Indonesia*, Unsoed Press, Purwokerto, 2022.
- Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdaia Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Agraris Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- _____, *hukum agraria Indonesia dan pelaksanaannya*, cetakan kesepuluh (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hartanti, Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2012
- Hartanto, Andy, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015
- Hosio, JE, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2007.
- Islamy, Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.

- Kasmiati, *Mencari Sisi Partisipasi Agenda Redistribusi Tanah Masa Pemerintahan Jokowi (Mengkaji Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Redistribusi)*, Sajogyo Institute, Yogyakarta, 2018.
- Larasati, Ayu Raffles, “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia,” *ZAAKEN* 1, 2020.
- Mahfud, *Politik hukum di Indonesia cetakan ke-5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. ria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II)*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Muliawan, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009.
- Nuraningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Pandoman, Agus, *Perbuatan Hukum Tertentu Dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2019.
- Perangin, Efendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Permadi, Iwan, *Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing*, Gunung Samudera, Malang, 2014.
- Putra, F. M. K., *Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Rahajro, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000.
- Rahman, Makalah tentang “Faktor-Faktor Penyebab banyaknya Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee/guntai”, 2015.

- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Salim HS, “*Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Salle, Aminuddin, (dkk), *Bahan Ajar Hukum Agraria*, (Makassar: AS Publisng, 2010.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Alas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Saputra, Imam Surya, Ilyas Ismail, “*Akibat Hukum Adanya Penyalahgunaankeadaan Pada Perjanjian Jual Beli Tanah Di Banda Aceh*,” Jakarta, 2011.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, PT.Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudarwan, Danim, *Peneliti Kualitatif Metodologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia, Edisi IV, Jakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Agraria Cetakan Keempat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

_____, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Usman Suparman, *"Hukum Agraria Indonesia"*, Serang, Suhada Press, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Perkaban Nomor 21 Tahun 2020)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Pasal 3a-3e tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secar Guntai (Absentee) Bagi Pegawai Negeri Sipil

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pdt.G/2014/PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 599/K/Pdt/2019

Jurnal

Andri, Pranata, “Problematika Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No.2, 2021, hlm 107.

Asta, Tri Setiawan, Sri, Kistiyah, Dan Rofiq, Laksamana, “Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi”, *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 4 No.1, 2001, Hlm.2.

- Astutiningsih, & Anastasia, A., “Peran Kantor Pertanahan Terhadap Pelaksanaan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee/ Guntai Di Kabupaten Sukoharjo”. *Repertorium*, Vol 5 No 1, 2018, hlm 11.
- Aqliyah, Hafifah Elsur dan Syaddan, Dintara Lubis, “Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2024, hlm 190.
- Chandra, Dewangga Marditya Putra, 2019, "Penerapan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm 42.
- Elfira, Permatasari, Habib Adjie, Hardianto Djanggih, “Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan”, *Varia Justicia*, Vol 14 No (1) 2018, hlm 56.
- Ernichel S. G. Pinontoan, “Pengaturan Tanah Guntai Dan Hak Kepemilikan Tanah Di Sulawesi Utara Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.13 No.3, 2024, hlm 5.
- Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”. *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm 285–306.
- Farah, Diba Maharani, “Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol.12 No.2, 2024, Hlm 227.
- Handojo, Djoko Waloejo Ana Silviana, Khairul Anami, “Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah,” *Law, Development & Justice Review* 3, 2020, hal 191.
- Ida, Ayu Windahari K.P dan I Wayan Suwardana, “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Absentee yang kepemilikannya berasal dari tanah warisan”, *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm 19.
- Intan, Imadhani, “Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan”, *Jurnal Notarius*, Vol. 17 No. 3, 2024, hlm 45.

- Juosfiel, Sadpri Pansariang, "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No.3, 2014, hlm 256.
- Junaedi, "Hubungan Antara Pasal 1338 Dan Pasal 1320 Kuhperdata Dalam Hukum Perjanjian Jual-Beli Tanah Di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol 1 No 4, 2021, hlm 109.
- M. Yazid Fatoni, "Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8 No 1, 2020, hlm 65.
- Mulyani, Djakaria, "Aspek Hukum Administrasi Kependudukan Dihubungkan Dengan Kepemilikan Tanah Secara Absentee", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 1 No 1, 2016, hlm 38.
- Pinontoan, Ernichel S. G., "Pengaturan Tanah Guntai Dan Hak Kepemilikan Tanah Di Sulawesi Utara Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 13 No. 3, 2024, hlm. 5.
- Prawira, I Gusti Bagus Yoga, "Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah", *Jurnal IUS*, Vol.4 No. 1, 2016, hlm 88.
- Rayyan, Dimas Sutadi, dan Luthfi, Ahmad Nashih, Dian Aries Mujiburahman, "Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm 194.
- Renhat, Malianus Siki, I Gusti Nyoman Agung, dan I Nyoman Darmadha, 2014, "Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, 2014, Hlm 2.
- Rongiyati, Sulasi, "Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2013, hlm 10-11.
- Shofani'matulawwaliyyah, Hendrasukarman, dan Ibnu Rusyidi, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Didesa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol 03 No 1, 2024, hlm 6.
- Sianturi, Rinaldo P dan Lisdiyono, Edy., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Berdasarkan Ketentuan

Pp Nomor 41 Tahun 1964”, *Jurnal Untag Semarang*, Vol 1 No 1, 2019, hlm. 25.

Sofyan, Hadi&Tomy Michael, “Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol 5 No 2, Desember 2017, hlm 120.

Sultan, Abdurrahman, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee" *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6, 2016, hlm 9.

Susilowati, Eny., “Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Palangka Raya”, *Jurnal Sociopolitico Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol 2 No 2, 2020, hlm 45.

Syamsu Alam, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tanah Absentee Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Papatuzdu*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm 10.

Utarry, Telung, Michael Mantiri dan Josef Kairupan, “Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No 3, 2019, hlm 110.

Veronika, Roselino, “Penyebab dan Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm 70.

Yayu, Palayukan, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 4, 2021, hlm 45.

Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi

Febriyanti, E.D, *Akibat Hukum Atas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Akta Bawah Tangan sebagai Alat Bukti (Studi Kasus di Kota Samarinda)*, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Rini, Anis Sulisty, *Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee dari pewarisan*, Tesis, Universitas Airlangga, 2015.

Nurhayati, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Semarang, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, 2006.

Armita, D, *Bahasa Kasar (Abussive Language) Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Perilaku Anak Di Desa Pelem*, Doctoral dissertation, Iain Ponorogo, 2022.

Media Online

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100>.

Diakses pada 13 Februari 2025

<https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/> diakses pada 5 Maret 2025.

<https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id> diakses pada tanggal 21 April 2025

<https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 21 April 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/> diakses pada tanggal 21 April 2025

<https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2025-UU8P> diakses pada 25 Mei 2025

